

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan serta wawancara yang dilakukan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Sleman, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Bahwa dalam sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik dengan menerapkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, akuntabel. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai penyelenggara di Kabupaten Sleman sudah berupaya semaksimal mungkin agar pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Sleman ini bisa meminimalisir adanya tindakan curang maupun tindakan yang berujung kejahatan yang melanggar hukum.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa terhadap sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman yaitu kendala dalam sistem yang dimana sistem tidak selalu sempurna dan selalu adanya *upgrade* sistem, sehingga menyebabkan aplikasi atau website menjadi *error* atau *bug*. Kendala lainnya adalah pada penyedia, yang dimana penyedia dalam pengumuman penyedia, penyedia tersebut tidak

ada sehingga mengulur waktu lagi dalam seleksi penyedia atau pengumuman tidak dapat dilakukan. Solusi yang dilakukan penyelenggara pengadaan barang dan jasa dalam mengatasi kendala tersebut adalah memperbaiki sistem yang ada, lalu memperpanjang waktu pendaftaran peserta tender atau penyedia barang/jasa, jika memang tidak ada yang mendaftar maka upaya yang dilakukan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia barang/jasa secara langsung sesuai dengan kesepakatan bersama.

B. Saran

1. Mengoptimalkan sistem *e-procurement* seperti e-Procurement yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Sleman bertujuan agar mempermudah masyarakat dalam menjangkau aplikasi dan website serta meminimalisir adanya *error* maupun *bug*.
2. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) di Kabupaten Sleman lebih mengawasi dalam penyelenggaraan seleksi dalam penyedia agar tidak terjadi kelalaian dalam pelaksanaan kerja yang telah diberikan pertanggung-jawaban.
3. Perlu adanya penyelesaian secara cepat dan tanggap dalam mengenai masalah yang tidak bisa diselesaikan di daerah, maka dari pusat harus secara sigap dalam penyelesaian kendala agar tidak mengulur waktu dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik khususnya di Daerah Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anggara, Sahya. 2018. *Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Febriani, Yosi. 2021. *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tingkat Dasar. Materi 1: Ketentuan Umum, Versi 4*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.[Online]. Tersedia: <https://virtual-library.lkpp.go.id/id/eprint/23/1/Materi%201%20-%20Ketentuan%20Umum%20-%20Versi%204.pdf>
- Imaniyati, Neni Sri dan Adam, Panji. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara, Edisi Pertama, Cetakan ke-1*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sadi, Muhammad. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-2*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Tjandra, W. Riawan. 2018. *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjandra, W. Riawan, 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Penerbit Kencana

Jurnal

- Adi, C. S. W. 2017. Analisis Penerapan E-Procurement menggunakan Sistem Pengadaan secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. 2(2): 1-16.
- Arifin, Zaenal. 2018. Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Responsif*. 5(5): 54-63.
- Hidayat, C. N. 2020. Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. *Pamulang Law Review*. 2(1): 37-46.
- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. 2020. Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. *Wacana Publik*, 14(02): 81-92.
- Septiawan, Budi. 2018. Keberhasilan Implementasi Sistem *e-Procurement* pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Akuntansi*. 2(1): 23-40.

Suci, Y. R. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. 6(1): 51-58.

Yorisca, Y. 2020. Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 17(1): 98-111.

Skripsi

Khairunnisya, Hedinar. 2018. *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) sebagai Upaya Terwujudnya *Good Governance* (Studi pada Unit LPSE Kota Batam). *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.

Putri, Amelia Anisah. 2019. Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tegal. *Skripsi*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.

Riandini, Zahra Amelia. 2013. *Model Kawal Imbang (Checks and Balances) sebagai Pola Hubungan Kelembagaan antara Eksekutif dan Legislatif di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Wahyuni, Sri. 2020. Implementasi *E-Procurement* Barang dan Jasa di Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Kabupaten Sleman. Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2010 Seri 8. Sekretaris Daerah. Sleman

Peraturan Bupati Sleman Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah. Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 13. Sekretaris Daerah. Sleman

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *E-Tendering*

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang *E-purchasing*

Internet

Penerapan, pada KBBI daring, tersedia di <https://kbbi.web.id/penerapan> . Diakses 9 September 2022.

Prinsip, pada KBBI daring, tersedia di <https://kbbi.web.id/prinsip>, diakses 9 September 2022.

Lain-Lain Wawancara

Tika kuswini, Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman, Wawancara Pribadi pada Selasa, 4 Oktober 2022.